

# NUSANTARANOMICS

Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris  
(Pendekatan Heterodoks)

Buku "Nusantaranomics" Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks) adalah sebuah pemikiran ekonomi alternatif yang diangkat dari nilai-nilai budaya lokal secara sosiologi maupun antropologi dan juga nilai-nilai agama yang hidup di Kepulauan Nusantara (baik agama Samawi maupun local) yang dikawinkan dengan nilai-nilai modern yaitu inovasi, efisiensi dan digitalisasi. Pendek kata Nusantaranomics adalah sebuah ekonomi hybrid yang berakar dari tradisi dan filosofi etnik Nusantara yang beragam. Gagasan ini awalnya digaungkan oleh Prof. Dr. Didin S. Damanhuri dalam berbagai forum ilmiah dan tulisan di media massa koran. Selanjutnya, beliau praksiskan dalam bentuk pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S-3) khususnya di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB. Dari karya-karya ilmiah itulah bahan buku ini disusun lewat proses *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga melahirkan buku yang hadir dihadapan pembaca. Tulisan yang disajikan dalam buku ini merupakan sintesis dari hasil diskusi yang telah diselenggarakan selama FGD sepanjang tahun 2022.

Dari sejumlah penulis dan pembahas yang tercantum dalam buku ini setidaknya telah melahirkan model-model pemikiran ekonomi alternatif dan kewirausahaan *genuine* khas masyarakat Kepulauan Nusantara yang hidup serta berdaya tahan tinggi hingga kini. Buku yang berjumlah 13 bab ini diharapkan akan menjadi "miles stone" baru dalam pemikiran ekonomi khas Indonesia yang dikonstruksikan ulang dengan kemajuan teknologi (digitalisasi), inovasi, dan efisiensi. Kelak akan melahirkan suatu Haluan pemikiran ekonomi Indonesia yang tidak lagi mengikuti arus pemikiran global yang belum tentu adaptif dengan kondisi sosiokultural, nilai-nilai kearifan lokal, ekologi, geografi, dan klimatologi Indonesia. Pasalnya, kerap kali yang diadopsi dari pemikiran luar justru mengalami kegagalan hingga memicu korupsi dan moral hazard yang mengakibatkan jauh panggang dari api mensejahterakan rakyat. Apalagi, konsep-konsep yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional itu dibiayai oleh utang luar negeri. Akibatnya, menambah beban negara akibat utangnya bertambah. Oleh karena itu buku ini kelal menjadi oase untuk mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi ekonomi Indonesia dengan pendekatan baru yang khas.



PT Penerbit IPB Press

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251-8355 158 E-mail: [ipbpress@apps.ipb.ac.id](mailto:ipbpress@apps.ipb.ac.id)

[f](#) [d](#) [v](#) [in](#) Penerbit IPB Press [@](#) [ipbpress.official](#) [ipbpress.com](#)

Ekonomi

ISBN : 978-623-467-703-4



Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks)

NUSANTARANOMICS



Editor

Didin S. Damanhuri | Muhamad Karim | Auhadillah Azizy



# NUSANTARANOMICS

Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris  
(Pendekatan Heterodoks)



Penulis

Didin S. Damanhuri | Ahmad Erani Yustika | Arya Hadi Darmawan | A. Prasetyantoko  
Andi Ishak | Bagong Suyanto | Endriatmo Sutarto | Elvawati | Fachru Nofrian  
Gumilar Rusliwa Somantri | Haryono | Lala Kolopaking | Joharatul Jamilah  
Iwan Nurhadi | Muhamad Karim | Muhammad Syukur | P. Setia Lenggono  
Rokhani | Sofyan Sjaf | Umar Juoro

# NUSANTARANOMICS

---

Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris  
(Pendekatan Heterodoks)



# NUSANTARANOMICS

---

## Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks)

Penulis:

Didin S. Damanhuri | Ahmad Erani Yustika | Arya Hadi Darmawan  
A. Prasetyantoko | Andi Ishak | Bagong Suyanto | Endriatmo Sutarto  
Elvawati | Fachru Nofrian | Gumilar Rusliwa Somantri | Haryono  
Lala Kolopaking | Joharatul Jamilah | Iwan Nurhadi | Muhamad Karim  
Muhammad Syukur | P. Setia Lenggono | Rokhani | Sofyan Sjaf | Umar Juoro

Editor:

Didin S. Damanhuri | Muhamad Karim | Auhadillah Azizy



**Penerbit IPB Press**

Jalan Taman Kencana No. 3,  
Kota Bogor - Indonesia

C.01/02.2023

**Judul Buku:**

Nusantaranomics  
Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks)

**Penulis:**

Didin S. Damanhuri | Ahmad Erani Yustika | Arya Hadi Darmawan | A. Prasetyantoko  
Andi Ishak | Bagong Suyanto | Endriatmo Sutarto | Elvawati | Fachru Nofrian  
Gumilar Rusliwa Somantri | Haryono | Lala Kolopaking | Joharatul Jamilah  
Iwan Nurhadi | Muhamad Karim | Muhammad Syukur | P. Setia Lenggono  
Rokhani | Sofyan Sjaf | Umar Juoro

**Editor:**

Didin S. Damanhuri | Muhamad Karim | Auhadillah Azizy

**Penyunting Bahasa:**

Atika Mayang Sari | Masbantar Sangadji | Pirlu Ramdhani | Muh. Firmansyah

**Desain Sampul & Penata Isi:**

Mokhammad Zulfatul Basith

**Sumber Foto:**

Unsplash.com

**Jumlah Halaman:**

332 + 26 hal romawi

**Edisi/Cetakan:**

Cetakan 1, Februari 2023

Diterbitkan dan dicetak oleh:

**PT Penerbit IPB Press**

Anggota IKAPI

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id

www.ipbpress.com

ISBN : 978-623-467-703-4

© 2023, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin tertulis dari penerbit

# KATA SAMBUTAN

**Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.S**

Rektor IPB University

Dalam pembangunan ekonominya dewasa ini, Indonesia membutuhkan dan mendisain suatu pendekatan baru yang khas dan bersifat *genuine*. Pendekatan ini diperlukan karena adanya karakter geografis dan sumberdaya alam yang melimpah serta sosial budaya masyarakat yang sangat beragam. Di samping itu, sebagian masyarakat Indonesia yang beragam belum tentu mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi kian cepat. Salah satu jawabannya adalah bagaimana mengongkritkan aksi *Pancasilanomics* dan merevitalisasi *Nusantaranomics*. Pendekatan ini juga menjadi anti tesis dominasi pemikiran ekonomi global sejak perang dunia kedua hingga saat ini. Setelah perang dunia kedua, pemikiran ekonomi dunia didominasi proyek modernisasi, ekonomi klasik maupun neoklasik.

Salah satu pendekatan di luar dominasi ekonomi klasik dan neo klasik yang berkembang di dunia yaitu heterodoks/eklektik. Prof. Didin S. Damanhuri merupakan salah satu pemikir ekonomi politik Indonesia dan dikenal banyak menggunakan pendekatan heterodoks dalam analisis maupun penyampaian gagasan-gagasannya. Hal itu dapat ditemui di berbagai tulisannya, termasuk dalam proses pembimbingan mahasiswa di IPB. Salah satu pemikiran beliau yang menonjol dan bercorak heterodoks adalah gagasannya tentang *Pancasilanomic* dan *Nusantaranomics*.

*Pancasilanomics* maupun *Nusantaranomics* bisa menjadi alternatif di luar pendekatan ekonomi arus utama yang mendominasi dunia. Namun, dalam konteks pemikiran, *Pancasilanomics* maupun *Nusantaranomics* perlu dibangun basis ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Dengan demikian pemikiran ini bakal terus bergulir sebagai kekuatan baru. Di samping itu,

perlu juga mengeksplorasi kekuatan-kekuatan potensi lokal dan pemikiran orisinil lainnya lewat riset. Sehingga akan berkembang pemikiran ekonomi yang membumi berdasarkan realitas Indonesia.

Implikasinya, bangsa Indonesia akan mampu membangun kepercayaan diri yang kuat dengan menggunakan kacamata, teori dan pendekatan yang tepat. Hal ini pada gilirannya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan struktural yang dihadapi bangsa ini seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, ancaman krisis pangan dan dampak perubahan iklim global.

Secara kontekstual, pendekatan pluralisme dalam pemikiran pembangunan secara ekonomi, sosial dan budaya menjadi keniscayaan. Pasalnya, tidak ada pemikiran pembangunan di dunia ini yang bersifat tunggal. Gagasan *Nusantaranomcis* diharapkan nantinya akan menghasilkan pemikiran orisinil khas yang mengkristal dan mewarnai pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan sehingga berpotensi mendorong pencapaiannya sebagai negara maju tahun 2045.

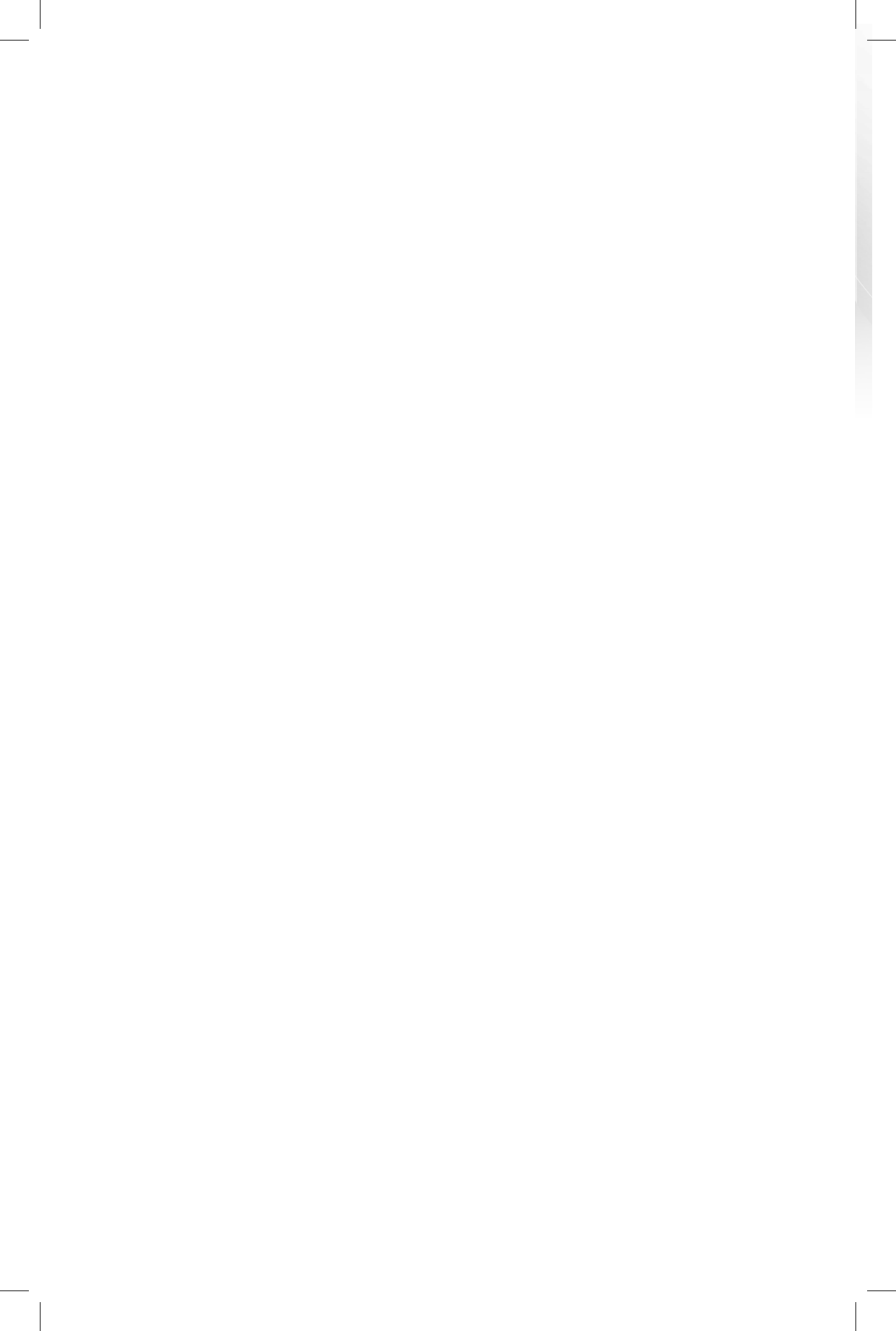
Ide Nusantaranomic yang digagas oleh Prof. Didin S. Damanhuri beserta para kolega, merupakan gagasan alternatif yang potensial untuk dikembangkan khususnya dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah. Setiap daerah tentu memiliki tipologi dan keunikan tersendiri dalam praktek ekonominya dan hal itu dapat menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Nusantaranomics merupakan praktek ekonomi yang berakar dari tradisi, budaya, corak etnisitas dan semangat agama. Keberadaannya sudah berkembang lama dan membudaya di lingkungan masyarakat Indonesia dan bersifat resilien di kala krisis ekonomi menerpa. Namun keberadaannya perlu beradaptasi dengan kondisi zaman yang semakin terdisrupsi.

Buku ini, memberikan contoh dan gambaran bagaimana praktek nusantaranomic berkembang di daerah. Isi dari buku merupakan hasil disertasi yang sudah mendapatkan pengujian dan pengakuan dari kampus, *plus* dibenturkan dengan tanggapan dan pandangan dari para pakar ekonomi yang disampaikan dalam forum diskusi terbuka, dalam sesi *Focus Group Discussion* (FGD).

Melalui buku ini tentunya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan semua pihak dalam memetakan kekuatan potensi ekonomi di daerahnya. Dengan demikian diharapkan ekonomi daerah tumbuh kuat dan menjadi penopang utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Akhirnya, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku yang merupakan hasil dari FGD series ini, Kerjasama antara Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB dan Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) yang dilaksanakan sejak tahun 2021-2022 ini. Semoga gagasan Nusantaranomic yang menjadi ruh dari semua tulisan dalam buku ini, dapat terimplementasi lebih baik dalam menopang praktek ekonomi nasional.





# KATA PENGANTAR

**Dr. Eva Anggraini, S.Pi., M.Si**

Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis  
IPB University

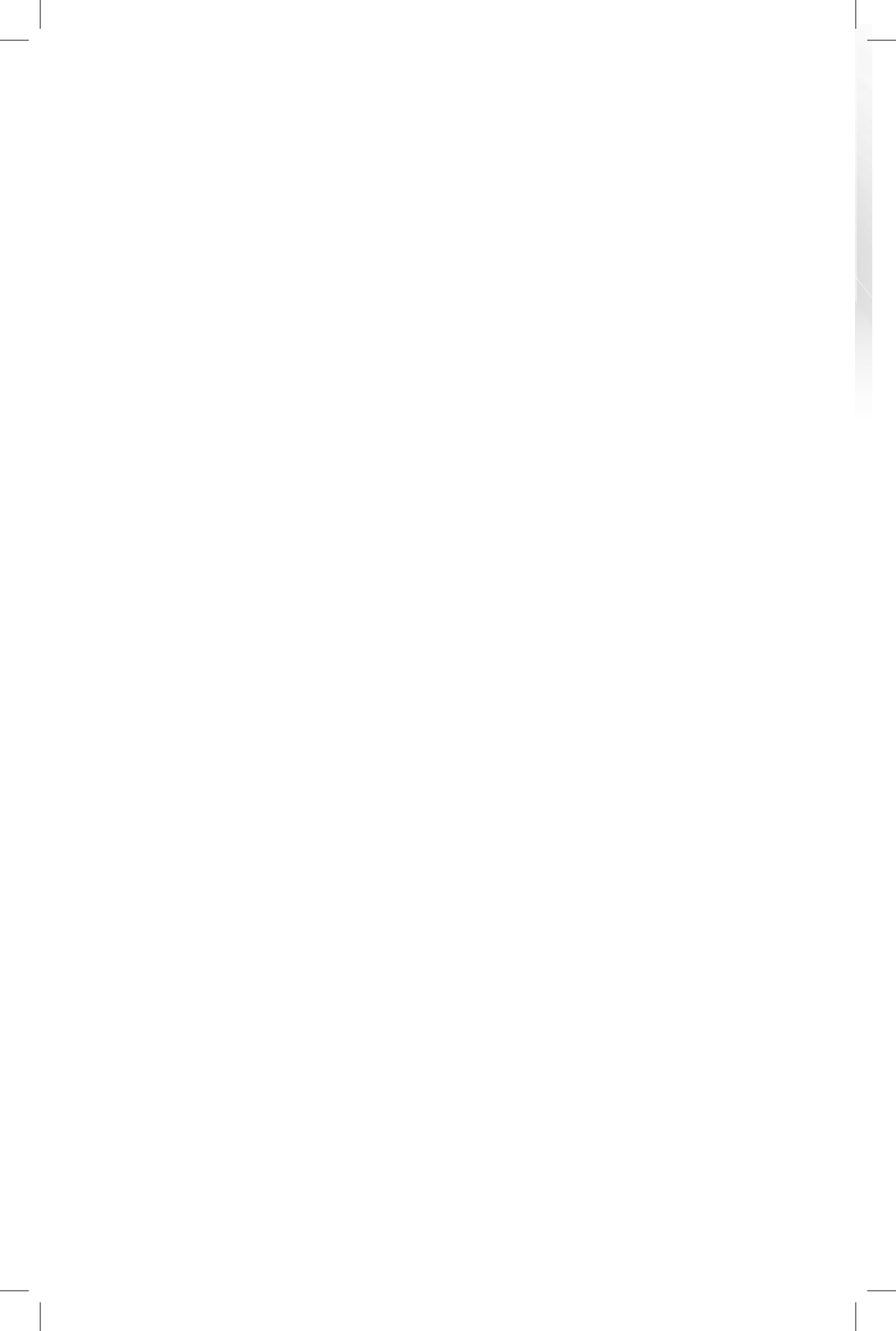
Perdesaan merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini, karena sebagian besar bahan baku bagi industri disuplai oleh kawasan ini. Namun paradigma pembangunan *urban bias*, yang lebih memprioritaskan peran perkotaan, seperti gayung bersambut dengan paradigma *urban phobia*, di mana kekhawatiran akan dampak negatif dari pertumbuhan wilayah perkotaan yang pesat, khususnya pada aspek sosial dan ekologi, mendorong isolasi wilayah perdesaan agar bebas dari kontaminasi perkotaan. Akibatnya perdesaan hanya difokuskan untuk kegiatan pertanian dan eksploitasi sumberdaya alam. Argumentasi ini memotivasi kajian IPB yang dipublikasikan dalam sebuah buku berjudul “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan”. Buku tersebut mengulas tentang peran penting perdesaan dalam pembangunan, serta instrumen untuk membangun ekosistem yang berketahanan dan bisnis perdesaan berbasis keunggulan lokal, agar perdesaan bisa menjadi lokomotif ekonomi nasional, bukan hanya sebagai elemen pendukung (Anggraini *et al.*, 2021). Kajian tersebut memberikan pesan bahwa pergeseran paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia untuk menempatkan perdesaan pada episentrum perekonomian benar-benar perlu didorong. Menjadikan perdesaan sebagai lokomotif ekonomi bukan untuk dimaknai sebagai pengurusan sumberdaya alam, namun sebaliknya, dengan menjadikannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi komitmen pelestarian sumberdaya alam pun semakin kuat dijalankan. Ekonomi yang dibangun dengan fondasi keunggulan lokal akan membangun ketahanan ekonomi yang kuat (*economic resiliency*).

Hasil kajian yang diuraikan di atas sangat selaras dengan pemikiran Nusantaranomics yang diulas di dalam buku ini. Sebagai sebuah model ekonomi, **Nusantaranomics bukan mengusung penyeragaman, melainkan keberagaman aplikasi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.** Artinya, keunggulan lokal, baik dalam bentuk sumberdaya alam/biofisik, sumberdaya manusia/keterampilan, maupun seni dan budaya, menjadi basis dari pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan didukung oleh modal sosial yang kuat, wirausaha lokal (*local entrepreneurship*) memiliki spirit yang membuatnya bisa langgeng dari masa ke masa. Keberagaman model ekonomi lokal ini tidak hanya merupakan kekayaan Indonesia, namun justru menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi disrupsi global yang akhir-akhir ini terjadi.

Menjadikan Nusantaranomics sebagai model pembangunan ekonomi wilayah dan nasional tentu memiliki tantangan, apalagi di era globalisasi, digitalisasi serta disrupsi yang penuh ketidakpastian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, meningkatkan kesiapan SDM lokal untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian yang sehat dan memiliki resiliensi. Meskipun banyak model ekonomi lokal merupakan warisan turun-temurun, namun peningkatan pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan agar bisa mengantisipasi dan merespons disrupsi global secara tepat. Untuk itu faktor *kedua*, yaitu dukungan pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memikirkan upaya peningkatan SDM lokal untuk bisa menjawab kebutuhan dan tantangan global. Kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan perguruan tinggi untuk pengembangan sekolah vokasi, merupakan salah satu upaya yang perlu ditempuh. Tidak hanya itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi yang selektif, yaitu yang memajukan bukan sebaliknya yang mengamputi geliat ekonomi lokal. *Ketiga*, SDM lokal perlu terbuka dalam mengadopsi inovasi untuk peningkatan daya saing. Inovasi akan terus menjadi motor penting dalam ekonomi, karena permintaan pasar sangat dinamis, sehingga hilirisasi inovasi tepat guna perlu menjangkau pelaku-pelaku ekonomi lokal. *Keempat*, menciptakan dan mempertahankan ekosistem yang sehat (ekologi dan sosial) bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Di sini peran kelembagaan lokal formal dan informal menjadi sangat penting, namun tentunya harus selaras dengan regulasi pemerintah.

Di sisi lain pun, regulasi pemerintah yang bias konglomerasi dalam penguasaan sumberdaya alam perlu benar-benar dikendalikan, agar tidak meminggirkan dan mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.

Pemikiran Nusantaranomics ini perlu disebarluaskan agar menjadi spirit bagi pertumbuhan ekonomi lokal, serta untuk memupuk harapan terbangunnya ketahanan ekonomi nasional. Implementasi Nusantaranomics yang berkelanjutan akan sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mewujudkan *green economy* (dan termasuk di dalamnya *blue economy*). Di masa yang akan datang pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari pengolahan sumberdaya alam, namun juga jasa ekosistem (seperti biodiversitas dan penyimpan cadangan karbon). Oleh karena itu, pengembangan model ekonomi lokal (Nusantaranomics) untuk jasa lingkungan/*intangible asset*, seperti perdagangan karbon dan *bioprospecting*, juga sangat terbuka lebar.



# PENGANTAR EDITOR

Prof. Dr. Didin S Damanhuri adalah Guru Besar Ekonomi Politik dan Pembangunan IPB University. Beliau termasuk salah satu “empuhnya” pemikir Ekonomi Politik Mazhab Heterodoks/Eklektik di Indonesia. Penyematan gelar ini tak berlebihan. Pasalnya, nyaris semua pemikiran beliau yang tersurat dalam seratusan buku, ratusan artikel dalam dan luar negeri, dan jurnal yang mencerminkan mazhab itu. Mazhab pemikiran ekonomi politik yang menyempal dari model kapitalisme dan sosialisme/strukturalisme. Gagasan dan cita-cita beliau adalah hendak membangun *School of thought* tersebut di Indonesia dengan mengkonstruksi ekonomi khas Nusantara (Nusantaranomics) yang dipengaruhi sosio-antropologi, sosiologi, kebudayaan etnik dan kearifan lokal secara ekologi dan ekonomi.

Beliau hendak membumikan pemikiran para pendiri negara yang dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 melalui revitalisasi dan transformasi nusantaranomics. Apalagi di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memengaruhi semua aspek kehidupan. Meskipun teknologi informasi itu hanyalah “alat” (*tools*) akan tetapi tak hanya mampu mendisrupsi semua aspek kehidupan sosial ekonomi. Melainkan juga melahirkan generasi baru dengan budaya baru. Prof. Didin ingin mentransformasikan nusantaranomics di era digital yang tak hanya melahirkan varian baru dalam pemikiran ekonomi. Melainkan juga dipraktikkan sebagai alternatif dalam membangun ekonomi nasional. Kemajuan negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia yaitu Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Cina akibat berkelindannya tiga hal dalam pembangunan ekonomi yaitu (i) nilai-nilai tradisi (*cultural values*); (ii) nilai-nilai modern yang diadopsi dari barat seperti efisiensi dan inovasi, dan (iii) nilai-nilai agama (*religion values*) yakni konfusianisme, Budhisme dan Islam. Akibatnya, yang muncul adalah model pembangunan ekonomi “khas” Asia yang beliau namakan nilai-nilai Asia (*Asian Values*).

Inilah yang menginspirasi beliau untuk merevitalisasi dan mentransformasikan Nusantaranomics. Menurut Damanhuri (2021), ide dasar Nusantaranomics adalah sebuah sistem ekonomi-politik yang berlandaskan ekonomi lokal, dengan praktik-praktik dan nilai-nilai lokal yang ada. Barangkali tidak rasional dalam kaca mata ekonomi dominan (baca: kapitalisme) saat ini, namun, terbukti efektif. Prof. Didin bersama sejawat dan bimbingan mahasiswanya telah mengumpulkan berbagai contoh praktik Nusantaranomics. Mulai dari praktik ekonomi lokal di Bugis, Jawa, Sunda, Batak hingga Minang, yang terbukti terus berkembang tanpa tergerus di era globalisasi. Nusantaranomics nantinya bakal menjadi sebuah mazhab ekonomi-politik Indonesia yang diangkat dari praktik-praktik dan nilai-nilai nyata yang bekerja dalam masyarakat. Praktik-praktik ini diformalkan menjadi sebuah mazhab—sebagaimana dahulu Bung Karno dan anggota BPUPKI lainnya merumuskan Pancasila. Gagasan tentang Nusantaranomics ini sejatinya merupakan aksi nyata dari sistem Ekonomi Pancasila.

Pemikiran ini di negara-negara Asia sudah terbukti eksis yang dikenal sebagai macan Asia. Mereka pun tetap eksis dan menjadi negara maju meskipun di tengah kemajuan teknologi informasi. Mereka juga mampu beradaptasi di era disrupsi ekonomi digital dan mentransformasi dirinya dalam mencapai keseimbangan baru dalam percaturan ekonomi global. Prof. Didin hendak meniru negara-negara macan Asia tersebut karena Indonesia memiliki keragaman budaya dengan kekhasan ekonomi berbasis etnik. Juga, nilai-nilai agama yang kuat dianut masyarakat Indonesia. Makanya, tak berlebihan jika Indonesia diramalkan bakal menjelma jadi negara maju dengan ekonomi yang menempati peringkat lima di dunia tahun 2045.

Gagasan ekonomi Nusantara yang digaungkan Prof. Didin telah melahirkan model kewirausahaan *genuine* khas masyarakat Nusantara. Pemikiran Prof. Didin ini persis dengan yang dikemukakan pakar ekonomi etnik, Mobasher. Mobasher (2002) menyatakan bahwa wirausaha sosial khas Indonesia lebih menekankan pada dimensi aktivitas kewirausahaan berbasis kebiasaan etnik (*ethnic based entrepreneurial activities*). Kelompok etnik berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang bermigrasi ke kota-kota besar juga ikut membawa dan mengembangkan ciri khas aktivitas ekonominya.

Dengan demikian, mereka itu dianggap sebagai bagian dari aktivitas ekonomi etnik tersebut. Contohnya, etnik Minangkabau dengan warung Padang, etnik Jawa dengan warung Tegalnya, bisnis besi tua orang Madura dan batik dari Jawa Tengah, Solo hingga Yogyakarta.

Bukan hanya Mobasher, pakar ekonomi etnik lainnya Light and Gold (2000) mendefinisikan kewirausahaan sosial khas Indonesia berbasiskan ekonomi milik kelompok etnik, sekaligus sebagai sumber daya ekonomi yang dimaknai berada dalam kendali etnik tersebut. Ida (2014) mengategorikan ekonomi etnik di Indonesia: *pertama*, kegiatan ekonomi suku-suku penghuni awal (asli) dari suatu daerah, yang dimiliki dan/atau diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berbagai aktivitas ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan umumnya berlangsung secara subsisten. Aktivitas yang dilakukan yaitu kebiasaan berburu binatang untuk dikonsumsi secara terbatas, maupun diperdagangkan sebagai sumber pendapatan keluarga. Contohnya konkretnya yaitu berburu paus secara adat di daerah Lamalera di Nusa Tenggara Timur (NTT), meskipun ini bersifat adat dan tidak diperdagangkan.

*Kedua*, produk (kreasi) budaya. Produk ini ini dikembangkan orang-orang dari suatu etnik berbentuk kerajinan tangan yang termasuk bagian kreasi budaya. Kreasi budaya ini merupakan wujud dari kewirausahaan beridentitas khusus dan berperan juga sebagai sumber nafkah keluarga. Contohnya, batik di Jawa dan kain tenun di berbagai daerah.

*Ketiga*, sumber daya alam yang ada dalam komunitas etnik. Berbagai etnik di negeri ini mendiami daerah/wilayahnya secara turun-temurun dengan sumber daya yang khas. Oleh karena itu mereka mestinya diposisikan sebagai pemilik otentik sumber daya alam tersebut yang juga melekat dalam kehidupan kesehariannya.

Jika dicermati secara substansial, pola-pola wirausaha sosial khas Indonesia yang merupakan perwujudan cara ekonomi yang berkebudayaan sesungguhnya merupakan manifestasi dari Sistem Ekonomi Pancasila pada tataran aksi. Hal ini dibenarkan Prof. Mochtar Naim dkk (1987) dalam sebuah buku berjudul “**Jurus Manajemen Indonesia. Sistem Pengelolaan Restoran**



**Minang sebuah *Prototype* Sistem Ekonomi Pancasila**” yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia. Buku ini mengulas secara khusus tentang *prototype* Warung/Restoran Padang sebagai model khas praktik Sistem Ekonomi Pancasila, sekaligus sebagai model kewirausahaan sosial Indonesia berbasis etnik.

Inilah salah satu model manifestasi “Nusantaranomics” yaitu suatu model ekonomi alternatif berkebudayaan yang melekat pada komunitas etnik itu sendiri (*embedded*). Hal ini sejalan dengan pemikiran Healy (2009) yang menyatakan bahwa: (i) ekonomi alternatif merupakan proses produksi, pertukaran, tenaga kerja/kompensasi, keuangan, dan konsumsi yang berbeda dari kegiatan ekonomi arus utama (kapitalis); dan (ii) ekonomi alternatif merepresentasikan ruang sosial yang beragam/heterogen dan proliferaif (memperbanyak bentuk yang sama).

Dalam pandangan Damahuri bahwa model ekonomi Nusantara yang berkebudayaan etnik ini merupakan salah satu model pendekatan heterodoks dalam pembangunan ekonomi yang harus didorong di Indonesia agar mencapai pemerataan yang berkeadilan. Damahuri tak hanya mendorongnya pada tataran ontologis maupun epistemologis. Melainkan, juga telah mengkonsolidasikan dalam bentuk aksiologi lewat bimbingan berbagai riset mahasiswa S1, S2 dan S3 yang mengkhususkan pada ekonomi Nusantara berkebudayaan etnik ini di IPB University, Bogor. Riset-riset tersebut dilakukan melalui pendekatan-pendekatan ekonomi politik heterodoks yang jadi “*trade mark*”-nya dan beraliran di luar arus utama pemikiran ekonomi (**Muhamad Karim dan Auhadilah Azizy**).

# DAFTAR ISI

## KATA SAMBUTAN

*Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.S.*..... v

## KATA PENGANTAR

*Dr. Eva Anggraini, S.Pi., M.Si* ..... ix

PENGANTAR EDITOR..... xiii

DAFTAR ISI ..... xvii

DAFTAR TABEL ..... xxiii

DAFTAR GAMBAR.....xxv

## PROLOG NUSANTARANOMICS: NEGARA KESEJAHTERAAN ALA INDONESIA

*Didin S Damanhuri* ..... 1

Ketimpangan sebagai Problem Pembangunan di Indonesia.....2

Negara Kesejahteraan ala Eropa .....6

Negara Kesejahteraan ala *Asian Way*.....7

Negara Kesejahteraan ala Indonesia .....8

Ekonomi Pasar Pancasila: Aras Nasional Nusantaranomics .....10

Nusantaranomics: *Living Pancasila*nomics di Aras Daerah .....15

Transformasi Nusantaranomics dalam ranah Keilmuan .....20

“*Epistemological Trap*” .....21

“*Heterodoxi* Pembangunan” .....25

**1. APA ITU NUSANTARANOMICS?** .....29

1.1 Nusantaranomics: Didin S. Damanhuri .....29

1.2 Nusantara Nusantaranomics: A. Prasetyantoko .....41

<b>2. LANDASAN TEORI NUSANTARANOMICS</b> .....	49
2.1 Teori Heterodoks: Muhamad Karim.....	49
2.2 Teori Ekonomi Heterodoks: Fachru Nofrian .....	62
2.3 Teori Ekonomi Kelembagaan: Ahmad Erani Yustika.....	74
2.4 Teori Ilmu Sosial: Arya Hadi Darmawan .....	81
<b>3. KEWIRAUSAHAAN LOKAL DAN ETNIK DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH DAN PEDESAAN</b>	
<i>Endriatmo Sutarto</i> .....	89
3.1 Peluruhan “Etos Kolektif Resiprokal” dan Senjakala Sosial Safety Net bagi Masyarakat Desa dan Daerah .....	90
3.2 “Korporatisme Negara dan Korporatisme Masyarakat” dan Dampak Eksesifnya pada Sendi-Sendi Kehidupan Sosial.....	92
3.3 Bagaimana Memposisikan Wirausahawan Lokal dalam Konteks Transformasi Kultural-Struktural Pedesaan .....	94
3.4 Penutup.....	97
<b>4. TANTANGAN POLITIK ETNIK DI ERA DIGITAL: PENGALAMAN EMPIRIS DALAM PEMBANGUNAN REGIONAL SULAWESI TENGGARA</b>	
<i>Sofyan Sjaf</i> .....	99
<b>5. PRAKSIS SISTEM EKONOMI PANCASILA ALA “WIRUSAHA ETNIK BUGIS” DI KALIMANTAN TIMUR: PENGALAMAN PERIKANAN UDANG DI DELTA MAHAKAM</b>	
<i>P. Setia Lenggono</i> .....	111
5.1 Pembentukan Ekonomi Lokal .....	111
5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Lokal Terhadap Perubahan <i>Landscape</i> Ekologi .....	117
5.3 Proses Reproduksi Ekonomi Lokal .....	118

5.4	Pertumbuhan Ekonomi Lokal dalam Kelangkaan Sumberdaya Alam .....	121
5.5	Implikasi Teoretis .....	134
5.6	Implikasi Kebijakan .....	135
5.7	Catatan Kritis .....	136
<b>6.</b>	<b>PRAKSIS EKONOMI NUSANTARA ALA MASYARAKAT WAJO. SULAWESI SELATAN BERBASIS TENUNAN</b>	
	<i>Muhammad Syukur</i> .....	139
6.1	Sejarah Perkembangan Tenun di Kabupaten Wajo .....	143
6.2	Tenun Bugis sebagai Praktik Ekonomi Nusanara (Nusantaranomics) .....	144
6.3	Tindakan Ekonomi Penenun Bugis .....	149
<b>7.</b>	<b>KONTRIBUSI EKONOMI DARI WIRUSAHA LOKAL BERBASIS KOPI: PELAJARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN, SUMUT</b>	
	<i>Rokhani</i> .....	159
7.1	Kolektivitas Ekonomi .....	162
7.2	Konstruksi Teori .....	167
7.3	<i>Empirical Evidence</i> : Kontribusi Ekonomi dari Wirausaha Lokal Berbasis Kopi di Kabupaten Simalungun .....	171
7.4	<i>Novelty</i> .....	174
<b>8.</b>	<b>DARI WIRUSAHA LOKAL MENUJU EKONOMI GLOBAL: PENGALAMAN DAN HISTORIS WIRUSAHA INDUSTRI BORDIR TASIKMALAYA DALAM PEREKONOMIAN LOKAL DAN GLOBAL</b>	
	<i>Joharatul Jamilah</i> .....	179
8.1	Sejarah Transformasi Industri Bordir Tasikmalaya .....	181
8.2	Penggunaan Alat Kerajinan Bordir dari Masa ke Masa .....	187
8.3	Perubahan Motif dan Jenis Kerajinan Bordir dari Masa ke Masa .....	189

8.4	Etika Moral, Jaringan Sosial, dan Tindakan Ekonomi Pengusaha Bordir.....	190
8.5	Isomorphisme Tindakan Ekonomi Pengusaha Bordir .....	191
8.6	Tipologi Pengusaha Bordir dan Jaringan Sosial.....	194
8.7	Jaringan Sosial Pengusaha Bordir.....	197
8.8	Ketahanan Industri Bordir: Keterlekatan Religio-Kultural dalam Jaringan Sosial.....	201
8.9	Ketahanan Industri Bordir: Perspektif Menak-Cacah.....	202
<b>9.</b>	<b>SOLIDARITAS PETANI DALAM MEMAJUKAN DESA DAN EKONOMI PEDESAAN (PELAJARAN DARI KONVERSI SIKLIKAL SAWAH - KELAPA SAWIT - SAWAH DI PEDESAAN BENGKULU)</b>	
	<i>Andi Ishak</i> .....	207
9.1	Pendahuluan .....	207
9.2	Sistem Pertanian Masyarakat Air Manjuntou.....	211
9.3	Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Mukomuko .....	213
9.4	Konversi Siklikal Sawah Irigasi di Air Manjuntou.....	217
9.5	Penutup.....	227
<b>10.</b>	<b>SOLIDARITAS EKONOMI RAKYAT BERBASIS SAWIT VTS A VTS KORPORASI NASIONAL DAN ASING. KASUS SUMATRA BARAT</b>	
	<i>Elvawati</i> .....	229
10.1	Ekspansi Kelapa Sawit: Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani.....	231
10.2	Pergeseran Preferensi Rumah Tangga Petani.....	232
10.3	Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Lokal dan Transmigran.....	235

10.4 Tipologi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Pasca Transformasi.....	240
10.5 <i>Heterodoks</i> sebagai Dasar Solidaritas Ekonomi Petani Sawit Minangkabau .....	241
<b>11. TANTANGAN DAN PROSPEK WIRUSAHA ROTAN DI ERA INDUSTRI 4.0. PENGALAMAN DAN HISTORIS INDUSTRI ROTAN DI CIREBON</b>	
<i>Haryono</i> .....	245
11.1 Tindakan Ekonomi <i>Local Genuine Entrepreneurship</i> (LGE) di Cirebon.....	248
11.2 Peta Aksi Ekonomi di Jejaring Sosial.....	256
<b>12. <i>CREATIVEPRENEUR</i> BERBASISKAN FESTIVAL DAN KEARIFAN LOKAL SUKU OSING DI BANYUWANGI</b>	
<i>Iwan Nurbadi</i> .....	259
12.1 Komodifikasi Budaya dan Transisi Etik dalam Perkembangan Pariwisata: Potret Suku Osing, Indonesia.....	259
12.2 Komodifikasi Budaya Osing sebagai Bentuk <i>Creativepreneur</i> ....	266
12.3 Utilitarianisme Konsekuensialisme Sebagai Etika Moral Ekonomi Osing dalam Kegiatan Pariwisata .....	278
12.4 <i>Creativepreneur</i> Suku Osing dalam bingkai Nusantaranomics ...	284
<b>13. DIALEKTIKA PEMIKIRAN PAKAR TENTANG NUSANTARANOMICS</b> .....	289
13.1 Solidaritas Ekonomi Rakyat dan Kewirausahaan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Global: Prof. Bagong Suyanto...	289
13.2 Nusantaranomics; Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Dr. Umar Juoro.....	290
13.3 Reorientasi Ekonomi Indonesia Berbasis Ekonomi Nusantara: Gumilar Rusliwa Somantri .....	293

13.4 Digitalisasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya  
Lokal pada Era Transisi Post-COVID19:

Lala M. Kolopaking.....299

**DAFTAR PUSTAKA**.....303

**BIODATA PENULIS & EDITOR** .....315

**BIODATA EDITOR** .....329

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kritik Boyer terhadap Teori Neo-Klasik .....	54
Tabel 2.2	Perbedaan pendekatan ekonomi heterodoks dengan konvensional .....	58
Tabel 2.3	Paradoks-paradoks dalam ekonomi .....	63
Tabel 2.4	Tantangan dan di tingkat global.....	63
Tabel 2.5	Perbedaan Pendekatan Ekonomi Heterodoks dan Arus Utama.....	64
Tabel 2.6	Perbedaan ekonomi neo-klasik dan <i>Regulation</i> (Heterodoks)....	65
Tabel 2.7	Model-model ekonomi berdasarkan Teori Regulasi .....	71
Tabel 4.1	Identifikasi praktik dalam arena ekonomi politik lokal di Kota Kendari .....	105
Tabel 7.1	Identifikasi lembaga lokal berdasarkan konsep modal dan habitus Bourdieu di Nagori Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun 2016 .....	160
Tabel 8.1	Contoh keterlekatan etika ekonomi dalam tindakan ekonomi pengusaha bordir.....	191
Tabel 8.2	Beberapa contoh kesamaan tindakan ekonomi pengusaha bordir .....	193
Tabel 8.3	Jaringan sosial pada 3 tipologi pengusaha bordir di Tasikmalaya .....	201
Tabel 8.4	Lapisan sosial masyarakat Tasikmalaya kontemporer dalam kegiatan bordir .....	204
Tabel 9.1	Jenis-jenis pertemuan warga di Dusun 7 Desa Tirta Mulya, Air Manjuntou.....	212



Tabel 9.2	Kebun kelapa sawit yang dikonversi menjadi sawah secara swadaya oleh petani ekstrasmigran di Air Manjuntjo.....	223
Tabel 9.3	Lokasi cetak sawah di Air Manjuntjo tahun 2017 .....	225
Tabel 10.1	Tipologi rumah tangga petani kelapa sawit berdasarkan sektor dominan pasca transformasi.....	240
Tabel 10.2	Solidaritas ekonomi dalam struktur neo dualisme .....	243
Tabel 11.1	Data jumlah unit usaha dan tenaga kerja di industri rotan .....	250
Tabel 11.2	Volume dan nilai ekspor mebel Kabupaten Cirebon tahun 2004–2010 .....	250
Tabel 11.3	Perkembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon tahun 2014–2017 .....	252
Tabel 11.4	Nilai Lokal Masyarakat Cirebon .....	256
Tabel 11.5	Jejaring sosial dalam manfaat ekonomi.....	258
Tabel 12.1	Capaian indikator kinerja Kabupaten Banyuwangi periode 2010–2018.....	260
Tabel 12.2	Komodifikasi ritual budaya Osing.....	271

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Pemikiran Heterodoks dalam Makro Ekonomi .....	56
Gambar 2.2	Teori-teori yang Mempengaruhi <i>Regulation</i> (Boyer 1995) .....	69
Gambar 2.3	Peta sejarah pemikiran dan Teori Ekonomi .....	84
Gambar 4.1	Peta sebaran etnik di Indonesia .....	100
Gambar 4.2	Posisi etnisitas -subjektivitas dan objektivikasi .....	101
Gambar 4.3	Indeks gini rasio di Kota Kendari sebelum dan sesudah Pilkada 2010 .....	103
Gambar 4.4	Posisi atau kedudukan pejabat berdasarkan etnis di pemerintahan Kota Kendari .....	107
Gambar 7.1	Integrasi lembaga lokal di Nagori Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun 2016 .....	164
Gambar 8.1	Bagan ketahanan industri bordir di Tasikmalaya .....	202
Gambar 8.2	Transformasi Menak-Cacah dari Feodal-Tradisional ke Modern-Ekonomi .....	204
Gambar 9.1	Lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Mukomuko. ....	214
Gambar 9.2	Pemetaan kelompok sosial pemilik perkebunan kelapa sawit rakyat di Mukomuko. ....	216
Gambar 9.3	Sawah baku pada daerah irigasi Air Manjuntou-daerah berwarna abu-abu tua adalah sawah baku yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat...218	
Gambar 9.4	Citra satelit penggunaan lahan sawah di 2 desa pada daerah irigasi Air Manjuntou: Lubuk Pinang (atas) dan Rawa Mulya (bawah) .....	219
Gambar 9.5	Perubahan sistem penyakapan lahan sawah irigasi milik etnis Minang Mukomuko di Air Manjuntou. ....	221

Gambar 9.6	Konversi kebun kelapa sawit kembali ke sawah oleh petani di Air Manjunto. ....	221
Gambar 9.7	Konversi kelapa sawit ke sawah oleh Pemerintah di Air Manjunto. ....	224
Gambar 9.8	Dinamika interaksi agensi-struktur dalam konversi perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sawah di Air Manjunto. ....	226
Gambar 9.9	Konversi sawah berpola siklikal di Air Manjunto. ....	227
Gambar 9.10	Sinergi agensi–struktur dalam program pembangunan pertanian. ....	228
Gambar 10.1	Kepemilikan lahan sawit di Indoensia tahun 2021 .....	230
Gambar 10.2	Kepemilikan lahan sawit di Sumatra Barat tahun 2021 .....	231
Gambar 10.3	Milestone perkembangan pergeseran komoditas karet ke kelapa sawit di Solok, Sumatra Barat.....	234
Gambar 10.4	Struktur pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit berdasarkan sumbernya pada desa lokal dan transmigrasi .....	235
Gambar 11.1	Sistem Hubungan Kerja Industri Rotan.....	252
Gambar 12.1	Sirkulasi komodifikasi budaya Osing.....	261
Gambar 12.2	Karakteristik Suku Osing.....	263
Gambar 12.3	Karakteristik <i>Creativepreneur</i> Suku Osing .....	267
Gambar 12.4	Transisi komodifikasi selektif suku Osing .....	277
Gambar 12.5	<i>Multiple Embeddedness</i> dalam budaya Suku Osing .....	280
Gambar 12.6	<i>Multiple Embeddedness</i> dalam <i>Creativepreneur</i> Osing Kemiren .....	285
Gambar 12.7	Model Pengembangan <i>Creativepreneurship</i> Osing Kemiren .....	287
Gambar 13.1	Tahap Perkembangan Masyarakat.....	300
Gambar 13.2	Tahapan krisis.....	301

# 6

---

## **PRAKSIS EKONOMI NUSANTARA ALA MASYARAKAT WAJO. SULAWESI SELATAN BERBASIS TENUNAN**

**Muhammad Syukur**

Secara historis, membicarakan soal tenun pada masyarakat Bugis di Wajo, Sulawesi Selatan telah berlangsung semenjak abad 13. Pada zaman kerajaan praktik ekonomi tenun ini sudah terjadi yang bertujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa adanya orientasi pasar. Peruntukannya adalah buat pakaian khususnya sarung. Namun ketika masyarakat Bugis melakukan kontak dengan “mekanisme pasar” khususnya dengan pedagang dari India dan Gujarat, mereka mulai terintegrasi dengan ekonomi pasar.

Kain tenun di masa itu sudah berkembang pesat dengan diadopsinya benang tenun perak dan emas. Penggunaan benang ini berkaitan erat dengan hubungan perdagangan dengan pedagang asal India dan Gujarat. Demikian juga dengan kehadiran pedagang dari Cina yang memperkenalkan benang sutra. Akibatnya, masyarakat Bugis mengadopsi benang sutra sebagai bahan baku kain tenunan. Malahan dengan adopsi benang sutra membuat variasi tenun masyarakat Bugis semakin berkembang.

Kegiatan tenun Bugis semakin terintegrasi dengan pasar terjadi ketika revolusi industri tenun jilid 1. Pada masa itu, alat tenun bukan mesin (ATBM) mulai masuk sehingga produksi tenun diproduksi secara besar-besaran. Akibatnya, pangsa pasar tidak hanya terkonsentrasi di Sulawesi Selatan, tetapi

juga ke daerah supralokal, nasional, dan mancanegara. Demikian juga ketika revolusi industri jilid II dengan masuknya alat tenun mesin, membuat tenun semakin menggeliat. Kondisi ini melahirkan tiga kelompok dalam aktivitas tenun Bugis. Kelompok tenun gedongan (mayoritas ->5000-an), kelompok tenun ATBM (1.900), dan pengusahaan tenun 23 orang. Fakta ini sebenarnya, mengoreksi ejekan-ejekan Robinson bahwa masyarakat Nusantara tidak mungkin melahirkan kapitalis yang sangat tergantung usahanya dari belas kasih pemerintah.

Dalam konteks kelahiran pengusaha tenun di masyarakat tenun Bugis-Wajo bukan sama sekali dari belas kasih pemerintah, bukan juga bersumber orang-orang elit tetapi mereka berasal dari masyarakat maradeka. Jadi mereka memiliki omset miliaran dan jaringan bisnis di berbagai wilayah yang lahir dari rahim lokal (golongan maradeka). Mereka sukses dalam usahanya karena terpaan pasar, dan merintis usaha dengan kerja keras. Perkembangan alat tenun yang sebelumnya hanya berorientasi kebutuhan rumah tangga mulai dirasuki *cost and benefit* dalam *mindset* masyarakat tenun Bugis karena interaksinya dengan pasar. Namun masyarakat tenun tersebut tidak meninggalkan nilai dan norma agama. Nilai tindakan ekonomi penenun tersebut senantiasa bekerja di antara *undersocialized* dan *otosocialized* (baca: Granoveter). Basis moral dan basis rasionalitas dalam aktivitas ekonomi tiga kelompok penenun di atas memiliki basis rasionalitas yang berbeda. Penenun gedongan, melakukan tukar-menukar benang tenun dengan prinsip *reciprocal*. Demikian juga pertukaran dalam kehidupan tidak ada hitungan ekonomi. Mereka rela meninggalkan pekerjaan jika ada daur kehidupan yang dilakukan oleh tetangga dan teman sejawatnya. Aktivitas produksi hanya memenuhi kebutuhan pokok tetapi tidak menjadi akumulasi kapital. Mereka enggan mengambil risiko besar dan spekulatif. Meskipun bersifat tradisional mereka juga memiliki rasionalitas formal ketika mengisi waktu luang untuk meraup keuntungan ekonomis dan menempatkan posisi lokasi tempat menenun, misalnya di dapur.

Mengapa menempatkan alat tenun di dapur? Alasannya, supaya mereka dapat melakukan aktivitas lainnya. Kemudian terjadi pembentukan kapital yang diarahkan untuk pendidikan dan membeli emas. Namun, belum

diarahkan untuk mengembangkan usahanya. Penenun ATBM bertindak rasionalitas substantifis, melakukan pertukaran bersifat resiprokal, dilandasi kejujuran sebagai modal dan tidak bertindak spekulatif. Sayangnya, mereka kurang inovatif sebagaimana pengusaha tenun. Mereka juga memiliki patronase dalam aktivitas tenun yang melibatkan keluarganya. Unikny, patronasenya tidak bersifat eksploitatif tetapi syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perkembangannya, penenun ATBM cenderung mulai berani mengambil risiko yang ditandai oleh tindakan menjual emas untuk pengembangan usaha. Ini menunjukkan adanya jiwa wirausaha dalam diri mereka.

Pengusaha tenun dalam aktivitas produksinya telah melibatkan dirinya dalam pertukaran menggunakan uang dan jasa. Mereka memilih menjalankan kesibukan bisnisnya dibandingkan menghadiri daur kehidupan. Tenun dijadikan sebagai pekerjaan pokok dan sumber utama penghasilan keluarganya. Mereka berani mengambil risiko, melakukan tindakan spekulatif, dan mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif. Pembentukan kapital sebagai bentuk investasi jangka panjang melalui pendidikan anak, pembelian emas dan sewa/beli tanah. Mereka juga melakukan perluasan usaha, peningkatan intensitas produksi, dan pembelian toko/butik.

Dalam rana rasional substantifis, pertukaran dalam daur kehidupan diwakilkan kepada anggota keluarga dan perilaku kejujuran. Keuntungan usahanya sebagian diperuntukkan untuk sosial dan keagamaan. Dalam segala aktivitas mereka berlangsung hubungan patronase, umpamanya aktivitas sosial keagamaan. Para pengusaha tenun kerap memberikan sumbangan terbesar dalam pembangunan Masjid dan kegiatan sosial. Pengusaha tenun Wajo kini telah melakukan ekspansi di Kota Makassar lewat dibukanya Butik dan Toko yang menjual hasil tenunan.

Tindakan ekonomi penenun dalam bingkai ekonomi modern pada level mikro memiliki sifat keterlekatan (*embeddednes*) pada kultur agraris. Hubungan antara buruh tenun dan majikan (pengusaha tenun) bersifat informal dan pengelolaan usahanya berada dalam manajemen keluarga.

Pada level meso, kelompok penenun gedogan dan penenun ATBM tidak mampu bersaing dengan pengusaha tenun. Pengusaha tenun lebih unggul dari penenun ATBM dan penenun gedogan. Hal ini dikarenakan pengusaha tenun memproduksi kain tenun Bugis dan berorientasi kebutuhan pasar.

Pada level makro, pengusaha tenun dan penenun ATBM kalah bersaing dibandingkan pengusaha tekstil nasional dan global. Sementara, penenun gedogan tidak terpengaruh keberadaan produk tekstil nasional dan global. Penenun gedogan melakukan aktivitas ekonominya yang sangat lekat dengan budaya Bugis-Wajo.

Pengusaha tenun sudah mengalami gejala *disembedded* terhadap budaya Bugis, namun masih ada nilai-nilai lokal yang melekat pada pengusahanya tapi tidak sekuat penenun gedogan dan ATBM. Orientasi jaringan sosial ekonomi mereka mengalami kecenderungan lebih kepada jaringan kekeluargaan dan jaringan kedaerahan, pertemanan, maupun kesukuan. Semakin kecil jaringan sosial ekonominya, maka semakin kuat *trust* yang terbangun. Demikian pula sebaliknya. Situasi ini memiliki kemiripan dengan yang dimiliki Jepang. Bedanya penenun di Wajo, peran negara menentukan klusterisasi usaha tenun, akan tetapi negara tidak memberikan perlindungan bagi pengusaha tenun yang lemah. Di Wajo juga, masyarakat yang bermukim dan bersinteraksi dengan penenun menjadi pendukung aktivitas sosial ekonomi tenun. Di Jepang, negara berperan penting dalam masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan subsidi dan bantuan (jaminan sosial). Sistem ekonomi Jepang mengembangkan *family based* dalam aktivitas ekonominya.

Dalam tindakan ekonomi tenun di Wajo justru terjadi *mix* rasionalitas. Kondisinya berbeda dengan apa yang dikemukakan Granoveter. Tindakan penenun Wajo menggabungkan *under-socialized* dan *upper-socialized*. Di satu sisi, mereka memegang teguh nilai kultural dan memberi jaminan sosial terhadap buruh tenun. Namun di sisi lain mereka berorientasi mendapatkan keuntungan. Jika dipetakan tindakan ekonomi berdasarkan kategorinya yaitu penenun gedogan memegang teguh nilai-nilai kultural dan berorientasi keuntungan ekonomis. Pengusaha tenun berorientasi akumulasi kapital dibarengi kontribusi dalam kegiatan sosial keagamaan. Pengusaha tenun membangun kemitraan dengan penenun gedogan dan ATBM

berdasarkan rasa solidaritas (moral) dan ekonomis (formal). Pengusaha tenun sebagai patron memberikan jaminan sosial kepada kliennya tetapi juga klien mendapatkan keuntungan ekonomis.

## 6.1 Sejarah Perkembangan Tenun di Kabupaten Wajo

Keberadaan tradisi menenun di Wajo pada masa lalu termasuk dalam kategori *high culture*. Awalnya hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adat. Namun dalam perkembangannya aktivitas menenun mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Perubahan ini terjadi pada aktivitas produksi massal yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai aktivitas budaya dan ekonomi, tenun di Wajo telah mengalami proses transformasi yang cukup panjang sejak abad ke-13 hingga kini. Berbagai peristiwa penting telah dialami sejak masa kerajaan yang ditandai kemampuan para penenunnya mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan mereka tetap eksis akibat proses transformasi secara terbuka untuk menerima pengaruh luar sambil memadukan unsur dari dalam yaitu kreativitas dan kecerdasan lokal (*local genius*) yang dimiliki penenun Wajo.

Pengaruh dari luar berupa penggunaan bahan baku (benang sutera dan zat pewarna sintetis) didukung teknologi tenun diserap dan diolah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Wajo. Penenun Wajo melakukan inovasi produksinya untuk beradaptasi dengan perkembangan selera pasar. Keadaan ini didukung oleh kebudayaan tenun yang mereka miliki dan kemampuan daya lenturnya. Proses transformasi corak tenun berkembang pesat sejak mulai dari era corak vertikal dan horizontal (*balo mattettong* dan *makkalu*) (tahun 1400–1600), dan corak kotak-kotak/palekat (1600–1900). Kini masyarakat setempat sudah mulai mengenal tenun dengan corak lebih baik dan bervariasi umpamanya corak garis-garis horizontal, yaitu babak corak bergambar (1900–sekarang). Corak ini berkembang pertenenan di Wajo dan tidak menghilangkan corak khas sudah ada sebelumnya. Demikian pula dalam teknologi penggunaan alat tenunan juga mengalami transformasi.



Mereka mulanya menggunakan alat tenun gedogan pada abad ke-13, lalu menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) semenjak tahun 1950, hingga menggunakan alat tenun mesin (ATM) sejak tahun 2004.

Pelestarian kegiatan tenun pada masyarakat Bugis-Wajo melalui proses sosialisasi dengan cara mengajarkan keterampilan menenun lewat aktivitas: *Pertama*, perempuan Bugis menerima keterampilan menenun dari ibunya dan meneruskannya secara berkelanjutan kepada anak-anak perempuannya. *Kedua*, keterampilan menenun diterima oleh perempuan Bugis sebagai adat yang mesti diketahui dan dikuasai sebelum menikah. *Ketiga*, terjadinya penyebaran keterampilan menenun pada etnis Bugis karena mereka berminat dan hendak mengetahui cara menenun serta kain tenun bernilai ekonomi penting dalam membantu ekonomi keluarga.

## 6.2 Tenun Bugis sebagai Praktik Ekonomi Nusanara (Nusantaranomics)

Kegiatan menenun bagi masyarakat Bugis-Wajo merupakan sebuah kearifan lokal (*local wisdom*) yang dipahami sebagai gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, bernilai baik dan melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Ragam kearifan lokal yang terkandung dalam fungsi kain tenun pada masyarakat Bugis, yaitu: 1) kain tenun sebagai pakaian keseharian atau sebagai alat untuk menutup tubuh dalam menahan pengaruh dari alam sekitar, 2) kain tenun sebagai hadiah, 3) kain tenun sebagai simbol status dan gengsi yang dianggap suci, dan 4) kain tenun sebagai benda yang digunakan dalam upacara adat.

*Pertama*, kain tenun Bugis sebagai pakaian semata terdiri baju dan sarung. Pakaian tersebut digunakan sebagai busana dalam kegiatan pernikahan. Pakaian tersebut juga digunakan dalam keseharian seperti memasak, mandi, menenun, belanja dan lain sebagainya.

*Kedua*, kain tenun dijadikan sebagai hadiah yang memiliki aneka makna yaitu: (i) sebagai bentuk penerimaan seorang mertua kepada menantunya, (ii) menjadi anggota baru dalam sebuah keluarga; (iii) sebagai tanda keselamatan kepada kerabat yang hendak merantau; (iv) pengganti uang

sumbangan (*passolo*) dalam acara pesta; (v) sebagai ungkapan rasa cinta dan penghormatan kepada seorang pejabat atau orang berpengaruh; dan, (vi) sebagai sumbangan dalam kegiatan keagamaan. Transaksi ekonomi dalam bentuk resiprokal melalui kain tenun sebagai hadiah *embedded* dalam adat dan agama yang dianut masyarakat Bugis-Wajo.

*Ketiga*, kain tenun sebagai simbol status dan gengsi sosial memiliki makna yaitu: banyaknya jumlah sarung yang digunakan sebagai penghias tempat resepsi perkawinan (*baruga*) untuk pengantin Bugis. Ini menyimbolkan tinggi rendahnya status sosial seseorang. Warna merah dan hijau dengan aksen benang emas dan perak sebagai simbol kebangsawanan.

*Keempat*, kain tenun sebagai benda yang wajib digunakan dalam upacara adat di antaranya: (i) upacara *mappalisu lolo*, yaitu upacara yang dilakukan sesudah 40 hari melahirkan; (ii) upacara *mappaci* yaitu malam pacaran bagi mempelai laki-laki dan perempuan; dan; (iii) upacara *maeppe gemme* (upacara pemotongan rambut anak). Pakaian kedua orang tuanya dipilih di antara pakaian adat. Anak tersebut lalu ditidurkan di atas tujuh susunan lipa (sarung) yang melambangkan tingkat kehidupan manusia.

Posisi penenun gedogan mampu bertahan sampai saat ini disebabkan kemampuan mereka mengisi kekosongan produksi kain tenun yang tidak dihasilkan oleh penenun ATBM. Produksi pengusaha tenun lokal, maupun yang diproduksi pabrik di aras nasional hingga global berfungsi sebagai busana yang digunakan dalam berbagai ritual adat dalam masyarakat Bugis. Kain tenun yang diproduksi penenun gedogan lebih dijadikan pilihan oleh masyarakat Bugis dan produksi sejenis yang dihasilkan oleh penenun ATBM serta pengusaha tenun. Posisi penenun ATBM dan pengusaha tenun juga tetap mampu bertahan karena mereka mampu menghasilkan pakaian sutera yang menjadi busana yang eksklusif dibarengi inovasi yang memadukan antara motif tradisional dan kontemporer.

Posisi Sulawesi Selatan sebagai penghasil benang sutera terbesar di Indonesia berkontribusi menjamin keberlanjutan kegiatan penenun pada ketiga kelompok penenun di Wajo. Kegiatan menenun bagi perempuan Bugis Wajo merupakan jenis pekerjaan yang membentuk etika kerja keras

(*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) dan kecermatan. Oleh karena itu, wanita yang mampu menyelesaikan satu lembar kain tenun dianggap sudah layak menikah. Pasalnya, ia sudah memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Etika kerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) tidak mutlak dimiliki laki-laki sebagai penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan pun dituntut memiliki etika kerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam masyarakat Bugis-Wajo, kehidupan dalam berumah tangga membutuhkan etika kerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) dan kecermatan. Oleh karena itu, perempuan (istri) memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan adanya jaminan keberlanjutan penghidupan bagi semua anggota keluarganya. Perempuan (istri) sebagai pihak yang mengelolah keuangan keluarga juga dituntut cermat atau teliti dalam menjaga harta hingga kehormatan suaminya. Dalam konteks kebudayaan Bugis, perempuan dikenal sebagai *pabbaressena uruwane* (tempat menyimpan harta yang didapatkan suami). Pada posisi inilah yang menjadi makna dari pesan bijak (kearifan lokal) orang Bugis yang mengatakan bahwa wanita yang sudah mampu menghasilkan kain tenun satu lembar dianggap sudah layak untuk menikah.

Dalam tradisi Bugis juga mengandung aneka mitos dan larangan terkait kegiatan menenun. Mitos dan larangan tersebut antara lain: *pertama*, masyarakat Wajo masih memercayai bahwa *walida* sebagai salah peralatan tenun yang digunakan dalam alat tenun gedogan merupakan senjata bagi kaum wanita. Mitos *walida* mengandung pesan moral tentang perlunya memuliakan perempuan. Pesan moral yang ingin disampaikan kepada kaum laki-laki soal mitos *walida* adalah agar kaum laki-laki memperlakukan perempuan secara baik dan jangan sampai mereka melakukan pelecehan seksual kepada kaum perempuan. Sementara, pesan moral yang hendak disampaikan kepada pihak perempuan dari mitos *walida* adalah agar mereka melakukan perlawanan terhadap kaum laki-laki yang ingin berbuat jahat terhadapnya.

*Kedua*, larangan berbicara sebelum benang yang sedang dianai (disau) berputar tujuh kali. Larangan ini memberikan peringatan kepada penenun untuk berkonsentrasi dan teliti dalam pekerjaan.

*Ketiga*, adanya hari baik dan hari dianggap buruk untuk menjalankan aktivitas menenun. Mitos hari baik dalam menenun mengandung pesan untuk segera menyelesaikan suatu pekerjaan, Pasalnya, masih ada pekerjaan lainnya yang bisa dikerjakan.

*Keempat*, adanya larangan atau *pemmali* untuk menenun pada waktu-waktu tertentu. Hal ini mengandung pesan bijak agar berhemat dan menabung sebagai bagian dari kesiapan mengantisipasi kehilangan pekerjaan dalam waktu tertentu serta adanya kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga.

Nilai-nilai kearifan lokal yang telah diuraikan di atas diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat, khususnya penenun gedogan. Namun penenun ATBM dan pengusaha tenun cenderung memiliki sikap rasional dan menghapus nilai-nilai magis yang diyakini dalam tradisi menenun. Rasionalisasi dalam kegiatan tenun oleh penenun ATBM dan pengusaha tenun memiliki kemiripan dengan kemunculan kapitalisme di Barat. Kapitalisme merupakan bentuk rasionalitas urusan dunia dan menghapus/menghilangkan nilai-nilai yang bersifat magis.

Kehadiran nilai-nilai kearifan lokal dalam kegiatan menenun menginspirasi pembentukan pranata keluarga (*family institution*) dalam masyarakat Bugis. Keluarga Bugis amat menekankan pentingnya setiap anggota keluarga memiliki etika tolong-menolong (*sibali resolsibali perri*), pekerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) dan tidak cepat menyerah (*temmangingngi*), ketelitian/cermat, irit/berhemat, etika perlindungan dan perlawanan terhadap kaum lemah atau tertindas. Fondasi keluarga dalam masyarakat Bugis dibangun berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam aktivitas menenun.

Pesan-pesan bijak tersebut ditanamkan kepada setiap anggota keluarga sebagai bagian dari upaya menegakkan *siri'na* (rasa malu/harga diri) dalam keluarga. Keluarga Bugis akan merasa malu (*masiri*) jika mereka jatuh miskin hanya karena mereka malas dalam bekerja. Keluarga Bugis juga merasa malu

(*siri*) dan memiliki rasa empati (*pesse*) untuk menolong sesamanya yang membutuhkan bantuan. Setiap anggota keluarga yang mendapat *pappaseng* (pesan bijak) dari leluhurnya dan memiliki kewajiban moral melaksanakannya sekaligus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Meskipun tidak ada sanksi fisik terhadap orang yang melanggar *pappaseng* (pesan-pesan bijak). Namun sanksi moral dari anggota keluarga bakal diberlakukan dengan memberi stigma sebagai pelanggar yakni orang yang tidak menaati dan mendurhakai kedua orang tuanya karena tidak menjalankan *pappaseng*.

Harga diri atau rasa malu (*siri*) dari keluarga yang melekat (*embedded*) dalam pesan bijak, kerja keras, dan kecermatan membuat setiap anggota keluarga berusaha menegakkan *pappaseng* sebagai bagian loyalitas pengabdian kepada keluarga. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut saling berkelindan satu sama lain dalam membina kehidupan keluarga. Kegiatan tolong-menolong antara semua anggota keluarga mutlak diperlukan untuk menopong kerberlanjutan kehidupan. Tolong-menolong antara anggota keluarga diimplementasikan dalam bentuk membantu dan meringankan beban anggota keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan. Kegiatan tolong-menolong diwujudkan dalam kondisi senang maupun mengalami kesusahan.

Setiap anggota keluarga juga dituntut bekerja keras (*reso/pajjama*). Dalam sistem sosial masyarakat Bugis, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, apabila pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu suami mencari nafkah termasuk anaknya. Dalam posisi tersebut istri dan anak mesti memiliki spirit pekerja keras dalam mencari rezeki untuk menolong suami sebagai pencari nafkah utama. Ketekunan, semangat pantang menyerah dan ketelitian berfungsi amat strategis dalam kehidupan keluarga. Semangat kerja keras dalam melaksanakan sesuatu tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak barengi ketekunan, semangat pantang menyerah dan ketelitian.

Secara empiris, kegiatan tenun berperan penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat Wajo. Gejalanya ditandai oleh sebagian besar komponen masyarakat Wajo memosisikan tenun sebagai sumber nafkahnya (baik sebagai sumber nafkah utama maupun sebagai sumber nafkah tambahan).

Kompenen masyarakat yang turut menikmati aktivitas pertenunan di Wajo seperti petani murbei dan ulat sutera, pedagang bibit ulat sutera, pedagang benang, penenun gedogan, penenun ATBM, pengusaha tenun, buruh tenun, dan pedagang kain.

### 6.3 Tindakan Ekonomi Penenun Bugis

Intervensi pasar dan perkembangan teknologi tenun dalam kegiatan pertenunan rakyat di Wajo menyebabkan terjadinya tiga kelompok penenun (penenun gedogan, penenun ATBM, dan pengusaha tenun) yang memiliki perbedaan keterlekatan (*embeddednes*) dan moral ekonomi. Gejala ini membuat posisi kain tenun Bugis berada antara produk kultural dan selera pasar. Kehadiran ketiga kelompok penenun Wajo dewasa ini merupakan respons dari pengaruh kapitalisme pertekstilan serta intervensi pasar dalam masyarakat penenun. Respons penenun gedogan terhadap kekuatan kapitalis pertekstilan serta intervensi pasar menunjukkan bahwa mereka tetap melekat (*embedded*) pada nilai-nilai ke-Bugis-an yang menjunjung tinggi etika tolong-menolong (*sibale perri/sibali reso*), saling memanusiaikan manusia dan menghormati sesama (*sipakatausipakalebbi*), dan kejujuran (*lempu*). Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh penenun gedogan amat kuat dan tidak mudah dipengaruhi gejolak harga pasar. Konsistensi penenun gedogan memproduksi kain tenun yang sarat dengan nilai-nilai kultural memiliki daya tahan yang relatif kuat terhadap masuknya produk tekstil yang dihasilkan kapitalis yang beroperasi di aras lokal, nasional dan global ke dalam masyarakat Bugis-Wajo.

Masalah lain yang membuat penenun gedogan bisa eksis adalah terkait kualitas dan nilai estetika kain tenun yang dihasilkan lebih unggul ketimbang produksi tekstil yang diproduksi kaum kapitalis. Hasil tenun gedogan memiliki kerapatan benang yang lebih baik dibandingkan produksi ATBM dan ATM. Warna yang dihasilkan juga lebih mengkilat ketimbang tenunan ATBM dan ATM.

Ketahanan sistem ekonomi penenun gedogan juga diperkuat adanya prinsip resiprokal dalam kegiatan menenun sehingga keterikatan pada modal menjadi sangat minim. Penenun gedogan setiap saat bisa meminta

benang kepada penenun gedogan lainnya apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkannya. Demikian pula sebaliknya, kekuatan yang berpotensi merobohkan sistem ekonomi penenun gedogan adalah ketika etnis Bugis meninggalkan budayanya. Akibatnya, kain tenun Bugis bukan tak menjadi penting lagi bagi mereka. Namun gejala tidak tampak hingga kini. Kondisinya saat ini menunjukkan bahwa kain tenun Bugis tetap menjadi lambang/symbol identitas masyarakat Bugis di mana pun mereka berada.

Penenun ATBM di Wajo merupakan kelompok penenun yang paling rentang mengalami kemunduran atau kematian usahanya dibandingkan dua tipe penenun lainnya. Meskipun sebagian tindakan ekonomi penenun ATBM masih berada pada kutub *oversocialized* (berdasarkan nilai-nilai budaya orang Bugis). Namun sebagian tindakan ekonominya mengalami pergeseran ke arah saling ketergantungan dengan aktor ekonomi lainnya. Pergeseran tindakan ekonomi ini mengakibatkan adanya kompetisi yang cukup ketat di antara para aktor ekonomi dalam pembentukan kapital. Penenun ATBM mulai memproduksi kain berdasarkan selera pasar yang sejatinya belum mampu bersaing dengan pengusaha tenun di pasar lokal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apalagi bersaing produksi tekstil yang dihasilkan kaum kapitalis nasional dan global. Sementara, penenun ATBM yang memproduksi kain tenun khas Bugis (produk kultural) memiliki kualitas yang kalah bersaing dengan produk penenun gedogan. Kendala lainnya adalah, keterikatan penenun ATBM terhadap modal sehingga mereka kesulitan bersaing dengan kapitalis lokal, nasional maupun global.

Pengusaha tenun merupakan pihak yang paling dominan meraup surplus ekonomi dalam kegiatan pertenunan di Wajo pada dewasa ini. Tindakan ekonomi pengusaha tenun lebih mengarah ke kutub *undersocialized* dibandingkan dua tipe penenun lainnya. Faktanya, hanya sebagian tindakan ekonomi pengusaha tenun yang masih melekat (*embedded*) dengan nilai-nilai ke-Bugis-an. Kehidupan pengusaha tenun dalam keadaan tertentu cenderung menilai solidaritas dari sisi materi, sehingga acapkali sifat kekeluargaan diabaikan dan lebih mementingkan operasionalisasi usahanya. Meskipun nilai solidaritas sosial mengalami penggerusan dalam hal tolong-menolong dalam berbagai daur kehidupan dan kegiatan tenun, namun solidaritas

sosial juga mengalami penguatan soal pemberian sumbangan buat kegiatan sosial-keagamaan. Pembentukan kapital di kalangan pengusaha tenun tidak diarahkan untuk berkontribusi besar dalam urusan materi/dunia semata, melainkan tetap menyisakan ruang berbagi terhadap sesama manusia khususnya lewat kegiatan sosial keagamaan. Tampak jelas bahwa pengusahaan tenun kerap sebagai memosisikan dirinya penyumbang terbesar di antara kedua kelompok lainnya.

Jaringan sosial dalam dinamika aktivitas tenun memudahkan mobilitas sumber daya. Salah satu keunggulan kegiatan tenun yang dijalankan pengusaha tenun dibandingkan dua tipe penenun lainnya di Wajo (penenun gedogan dan penenun ATBM) adalah kemampuannya melakukan mobilitas sumber daya. Untuk mengembangkan usaha tenunnya, pengusaha tenun membutuhkan kemampuan memobilisasi sumber daya dalam bentuk informasi dan finansial. Kemampuan pengusaha tenun menggerakkan sumber daya ditopang jaringan sosial ekonomi yang dimilikinya. Jaringan sosial kalangan pengusaha tenun lebih luas dan melibatkan multipihak. Hal ini sejalan dengan temuan Powell dan Smith-Doerr (1994) tentang pentingnya jaringan sosial dalam membantu kemampuan memobilisasi sumber daya dalam bentuk finansial dan informasi dalam mengembangkan usaha. Pengusaha tenun dalam mengembangkan usahanya, tidak hanya mengandalkan jaringan sosialnya di tingkat lokal, tetapi juga membangun jaringan sosial di level nasional dan global. Inilah yang membedakan dengan dengan jenis penenun lainnya yang hanya mengandalkan jaringan sosialnya di tingkat lokal.

Preferensi penenun di Wajo dalam mengembangkan usahanya di daerah baru dan belum dikenal menerapkan strategi dengan cara menelusuri pebisnis daerah memiliki hubungan latar belakang kerabatan, kedaerahan, kesukuan dan pertemanan. Jika mereka gagal menemukan jaringan pebisnis dengan latar belakang demikian, maka mereka mengarahkan pilihannya kepada pebisnis dari etnis lainnya (non-Bugis) untuk diajak bekerja sama yang saling menguntungkan. Penelusuran tersebut menunjukkan bahwa jaringan sosial dimanfaatkan oleh penenun di Wajo untuk melakukan ekspansi bisnis.



Tipe jaringan sosial yang berada dalam tiga level penenun yaitu jaringan sosial yang bersifat emosional, kepentingan (*interest*), dan power, hierarkis maupun horizontal secara terus-menerus saling bersinggungan. Persinggungan tersebut acapkali menimbulkan ketegangan dari aktor yang terlibat dalam jaringan bersangkutan karena logika situasional dan struktur sosial dari setiap tipe jaringan. Di sinilah melahirkan tindakan rasional campuran. Tindakan *mix rationality* (rasionalitas campuran) merujuk pada tindakan sosial ekonomi yang dilakukan penenun Wajo yang menggabungkan antara tindakan rasionalitas formal dan tindakan rasionalitas moral ke dalam satu tindakan. Praktik tindakan *mix* rasionalitas di antara ketiga tipe penenun di Wajo memiliki derajat berbeda yakni tindakan sosial ekonomi penenun gedogan lebih menonjolkan rasionalitas moral dibandingkan dengan rasionalitas formal. Penenun ATBM cenderung lebih berada di tengah (moderat) yaitu tindakan sosial ekonominya cenderung menyeimbangkan antara tindakan rasionalitas formal dan tindakan rasionalitas moral. Pengusaha tenun menonjolkan tindakan rasionalitas formal dibandingkan dengan rasionalitas moral. Penenun gedogan lebih mengedepankan nilai-nilai kultural dalam memproduksi kain tenun, namun di sisi lain mereka hendak berupaya mendapatkan keuntungan ekonomis dari hasil produksi kain tenunnya.

Akumulasi kapital yang dilakukan oleh pengusaha tenun tak hanya diarahkan buat kepentingan urusan dunia (pengembangan usaha), melainkan juga digunakan membantu terhadap sesamanya dalam kegiatan sosial keagamaan. Pengusaha tenun memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat dibandingkan dua tipe penenun lainnya. Namun, tidak serta mematikan dan mengeksploitasi penenun yang lebih lemah. Melainkan, pengusaha tenun membangun kemitraan dengan penenun ATBM dan penenun gedogan. Kemitraannya melibatkan adanya rasa solidaritas (moral) di satu sisi, dan di sisi lain mendatangkan keuntungan ekonomis setiap pihak yang bermitra. Kehadiran patron (pengusaha dan penenun ATBM) memberikan jaminan sosial dan pekerjaan serta upah kepada para klien (buruh) untuk bekerja sepanjang sejalan kehendak klien. Namun patron (pengusaha dan penenun ATBM) juga mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap hasil produksi klien (kain tenun yang dihasilkan oleh klien (buruh tenun)).

Setiap tindakan ekonomi yang dijalankan tiga golongan penenun Wajo mempertimbangkan keuntungan ekonomis di satu sisi. Tetapi di sisi lain juga mempertimbangkan unsur perasaan solidaritas dan moral. Terjadinya kompromi antara tujuan ekonomi yaitu hendak mencari manfaat (*utility*) berupa keuntungan ekonomis dengan sifat tenggang rasa mencerminkan perwujudan proses adaptasi kultural yang membentuk rasionalitas ekonomi khas kalangan penenun. Rasionalitas menjadi kekhasan dari tindakan ekonomi penenun Wajo adalah tindakan “*mix rasionalitas*”. Suatu rasionalitas ekonomi yang terbangun melekat (*embedded*) dan terkandung dalam nilai-nilai budaya *siri*’ dan *passe*’. *Siri*’ beroperasi dengan cara memanusiaikan orang lain yang kehidupan ekonominya sedang terpuruk sehingga tidak harus kehilangan martabatnya. Sementara *passe*’ beroperasi melalui rasa empati dan belas-kasih untuk bisa saling berbagi (tolong-menolong), sehingga tetap memelihara solidaritas dan sikap saling percaya dalam kelompok.

Rasionalitas ekonomi yang mewujud bukan merupakan penghalang menuju suatu tata-cara pengelolaan perekonomian modern yang menuntut rasionalitas ekonomi tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, kehadiran tiga-tipe penenun Wajo memiliki basis etika moral ekonomi dan jaringan sosial yang berbeda dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya “*mix rasionalitas*” dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi. Umpamanya, penenun gedogan memiliki rasionalitas yang lebih mengedepankan solidaritas sosial atau kolektivitas karena melekat kuat pada nilai dan norma yang dianut masyarakat Bugis. Tindakan ekonomi penenun gedogan lebih didorong rasa solidaritas yang tinggi dan bukan berorientasi mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Rasionalitas penenun ATBM cenderung berada di tengah-tengah kutub solidaritas sosial atau kolektivitas dan individualis yang berorientasi diri (*selfinterest*). Sedangkan, pengusaha tenun memiliki tindakan ekonomi yang cenderung ke arah individualis ketimbang kolektivitas yaitu ragam tindakannya berorientasi keuntungan ekonomi serta mengarah saling ketergantungan dengan aktor ekonomi lain.

Rasionalitas dari Weber (1978; Turner, 1998; Ritzer dan Goodman: 2007) memetakan 4 kategori tindakan yaitu; 1). Rasional Instrumental (*Zweckrationalitat*), yaitu tindakan rasional yang berdasarkan kesadaran

akan pertimbangan dan pilihan yang berhubungan dengan tujuan tindakan serta alat yang digunakan mencapainya. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang paling rasional. 2) Rasionalitas yang Berorientasi Nilai (*Werturationalitet*), yaitu tindakan aktor yang dipandu suatu nilai dalam menentukan tujuannya; 3) Tindakan Tradisional (*Traditional Action*) yaitu tindakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu dan masih dipraktikkan serta diterima begitu saja tanpa adanya refleksi maupun perencanaan dari aktor; 4) Tindakan Afektif (*Affectual Action*) yaitu suatu tindakan yang dilandasi perasaan atau emosi, tanpa adanya refleksi intelektual dan perencanaan yang sadar.

Teori Weber amat tepat untuk menganalisis problematika penenun di Wajo. Temuan penelitian Syukur (2015) menunjukkan bahwa adanya “tindakan ekonomi campuran” yaitu rasionalitas instrumental dan rasionalitas tradisional hadir bersama dalam satu tindakan dari penenun. Bukti empirisnya menunjukkan bahwa ibu SL<sup>7</sup> hanya mau menjual kain tenun corak bangsawan (corak cobo, warna kuning dan hijau) kepada kalangan bangsawan Bugis. Sedangkan kain tenun corak biasa ia menjualnya kepada kalangan masyarakat umum sesuai harga pasar. Tindakan ibu SL yang mau menuruti pesan (*pappaseng*) orang tuanya yang menunjukkan bahwa tindakannya bersifat tradisional. Pasalnya ia menuruti kebiasaan turun-temurun dari orang tuanya yang berprofesi sebagai penenun bagi raja-raja Bugis di masa lalu. Namun, di sisi lain tindakannya juga mengandung rasionalitas instrumental karena kain tenun yang dijual kepada kaum bangsawan mendapatkan keuntungan ekonomis dengan harga jualnya sesuai harga pasar.

Bukti empiris lainnya menunjukkan bahwa kalangan pengusaha tenun mampu mengakumulasi kapital dalam bisnisnya. Akan tetapi mereka tidak berorientasi ekonomi semata, melainkan sebagian kapital yang diperolehnya diperuntukkan buat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti membantu kaum lemah, mengeluarkan zakat, naik haji dan lain-lain. Tindakan kalangan pengusaha tenun yang mengumpulkan kapital (sebagai rasional instrumental) sekaligus berfungsi sebagai sarana berbagi dengan sesama manusia dan mendekatkan diri pada Tuhan (tindakan afektif).

---

7 Nama seorang responden

Terdapat perbedaan dengan teori keterlekatan (*embeddeness*) Granovetter (1985; 1992) yang mengemukakan tindakan aktor ekonomi bekerja di antara kutub *undersosializad* (tindakan ekonomi rasional dan berorientasi pencapaian individual (*self interest*)) dan kutub *oversosialized* (tindakan ekonomi dituntun aturan-aturan berupa nilai dan norma). Teori keterlekatan Granovetter tersebut terkesan memandang nilai-nilai dan norma, budaya serta agama bersifat statis, jika dikaitkan dengan kasus masyarakat tenun Wajo. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kandungan makna dari tiga kelompok penenun terhadap nilai dan norma serta agama yang dianutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai dan norma serta dogma agama berpeluang terbuka untuk menafsirkan kembali berdasarkan orientasi tindakan setiap aktor ekonomi. Meskipun tindakan ekonomi yang dijalankan penenun melekat (*embedded*) dalam budaya dan agama yang dianutnya. Namun realitas menunjukkan bahwa tindakan ekonomi dalam memaknai kerja (*reso*) dan nasib (*were*) sebagai bagian dari nilai budaya dan dogma agama yang dianut orang Bugis berbeda di antara tiga tipologi penenun. Kondisinya terjadi karena kebudayaan dan dogma agama sejatinya menyisakan ruang penafsiran atau pemaknaan ukang oleh tiga tipe penenun Wajo. Melemahnya legitimasi adat dalam kehidupan masyarakat Bugis dan absennya pemuka agama yang amat dihormati serta memiliki otoritas dalam menafsir dogma agama di tengah kehidupan masyarakat menyebabkan masyarakat penenun memiliki ruang penafsiran atau memaknai kembali kebudayaan dan dogma agama yang dianutnya sesuai orientasi hidup serta kondisi sosial yang mereka hadapinya.

Keyakinan bahwa *dalle* (rezeki) setiap orang telah ditentukan (secara kualitas maupun kuantitas) oleh yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa ketergantungan sistematis kehidupan “duniawi” atas “agama” yang sakral yaitu duniawi tidak bernilai kecuali berhubungan dengan “agama”. Dualistik kerja (*reso*) dan nasib (*were*) yaitu kerja duniawi tidak dijalankan berdasarkan efisiensi bagi etika kerja produktif. “Perkenaan Tuhan” dengan ketaatan syariah di satu pihak bekerja efisien serta rezeki yang diperoleh saling berkelindan tetapi tidak bersifat kausalistik. Orientasi tindakan ekonomi penenun gedogan melekat (*embedded*) dalam pemahaman budaya dan agamanya dan menganggap kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) amat ditentukan oleh Tuhan ketimbang usaha manusia. Menurut mereka kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) tidak

merujuk pada kerja rasional dan sistematis (*undersocialized*) melainkan pada *Elona Puang* Allahu Taala (“ridho Tuhan”) yang bersifat abstrak dan misterius. Tindakan ekonomi semacam ini terkesan memaknai nilai-nilai budaya Bugis dan ajaran agama sebagai penghalang mencapai kemajuan dalam kehidupan ekonomi. Kondisi semacam ini oleh Geertz (1983) menganggap budaya sebagai penghalang kemajuan ekonomi (*culture-as-obstacle*).

Kalangan penenun ATBM memandang bahwa kerja (*reso*) untuk mendapatkan rezeki (*dalle*) merupakan tututan budaya dan agama. Meskipun dalam pandangan mereka bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Tuhan untuk setiap orang. Namun karena sifatnya abstrak, maka rezeki harus dicari dengan berusaha karena ia tidak datang menghampiri manusia. Kerja keras merupakan jembatan mendapatkan rezeki. Kepasrahan akan timbul apabila kerja maksimal sudah dilaksanakan. Mereka bersiap menerima apapun konsekuensi dan hasilnya sebagai bagian nasibnya (*were’na*). Tidak ada rasionalisasi untuk mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan yang dialami dalam berusaha. Orientasi tindakan ekonomi di kalangan pengusaha tenun melekat (*embedded*) pada pemahaman budaya dan agamanya yang menganggap kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) ditentukan oleh Tuhan sebagai bagian dari nasib (*were*) yang mesti diterima manusia. Oleh karenanya, rezeki merupakan bagian dari nasib (*were*) yang bersifat abstrak. Manusia wajib bekerja keras mencarinya. Menurut mereka kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) merujuk kerja rasional dan sistematis agar mendapat ridho Tuhan yang abstrak dan misterius. Pengusaha tenun cenderung selalu melakukan rasionalisasi untuk mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan kerjanya. Pembentukan kapital bukan sesuatu yang dilarang dalam konteks budaya Bugis dan agama Islam sepanjang dilakukan secara jujur dan halal (*sappa dalle hallala*). Pasalnya, cara demikian berpotensi seseorang membantu orang lain yang kurang beruntung. Tindakan ekonomi semacam ini terkesan memaknai nilai-nilai budaya Bugis dan ajaran agama sebagai pendorong mencapai kemajuan kehidupan ekonomi. Di sinilah posisi budaya dan agama berperan sebagai pendorong kegiatan ekonomi (*culture-as-stimulus*) (Geertz: 1983).

Berbagai jaringan yang dimiliki dan dimanfaatkan kalangan penun dalam kegiatan ekonomi menunjukkan adanya *mix* rasionalitas. Ikatan-ikatan yang membalut jaringan tersebut misalnya *interest* (kepentingan), hubungan emosional atau solidaritas, dan *power* (kekuatan) bekerja saling berhimpitan dalam jaringan milik penun. Jaringan yang diikat *interest* (kepentingan) cenderung mengedepankan rasionalitas ekonomi atau rasionalitas formal dengan ikatan lemah. Jaringan yang diikat hubungan emosional yang lebih menonjolkan moral ekonomi berlangsung dalam ikatan yang kuat. Kekuatan (*power*) berlangsung dalam hubungan yang bersifat asimetris atau hierarkis. Namun tidak bersifat eksploitatif dan manipulatif tetapi menjurus pada pola hubungan patron/klien. Posisi patron dalam jaringan yang dimiliki penun tidak menghisap klien, melainkan memposisikan diri sebagai pengayom dan memberikan jaminan keamanan dan penghasilan klien.

Konsep pemikiran teoretik Granovetter memberikan suatu interpretasi yang cenderung lebih mendasar. Ia mengatakan bahwa aktivitas kehidupan ekonomi mengandung “kelekatan sosial” (*embeddedness*). Oleh karenanya, tindakan ekonomi seorang individu tidak luput dari hubungan-hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kecenderungan ini memberikan kerangka pemikiran bahwa nilai-nilai budaya dan agama cukup berpengaruh dalam mendorong perkembangan ekonomi. Atau, sebaliknya menghambat perkembangan ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu. Karenanya, merupakan suatu fenomena sosial yang cukup rumit untuk memisahkan antara “basis moral” dengan “tindakan rasional ekonomi” dalam masyarakat. Hal ini disebabkan keduanya saling berkaitan secara bervariasi, termasuk dalam kasus kehidupan sosial ekonomi masyarakat penun di Wajo. Pasalnya, dalam realitasnya adalah antara pertimbangan moral dan aktivitas ekonomi yang berbasis kalkulasi rasional, untung-rugi, acapkali bersifat kontradiktif. Namun dalam penelitian Syukur (2015) menemukan antara moral dan aktivitas ekonomi terjadi kompromi. Dalam pengertian, di satu pihak perlu mengikuti tuntutan “moral ekonomi” yang telah melekat kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun di pihak lain, tuntutan mekanisme pasar sudah semestinya dikedepankan sebagai pertimbangan rasionalitas ekonomi supaya meraup keuntungan ekonomi.